

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MELALUI DESA WISATA DI DESA KERTAWANGI KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Shafira Pratiwi Sulistyawati¹⁾, Agustina Setiawan²⁾, Siti Munawaroh³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Ekonomi Melalui Desa Wisata di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat”. Fenomena masalah dalam penelitian ini yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki oleh desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Peneliti menggunakan teori dari Saraswati yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu: 1)*Learning by doing* 2)*Problem solving* 3)*Self evaluation* 4)*Self development and coordination* 5)*Self selection* 6)*Self decisim*. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Unit analisisnya adalah Desa Kertawangi. Informan meliputi Kepala Desa, LPMD, POKDARWIS, BUMDES dan masyarakat petani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kertawangi dilihat dari dimensi *learning by doing*, *problem solving*, *self evaluation*, *self development and coordination*, *self selection and self decisim*, pemberdayaan telah berjalan dengan baik namun masih belum optimal.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Ekonomi, Desa Wisata.

Abstract

*This research is entitled “Community Empowerment by the Village Government to Improve the Economy through Village Tourism in Kertawangi Village, Cisarua District, West Bandung Regency”. The phenomenon of the problem in this study is the lack of public awareness of the potential owned by the village. The purpose of this study is to analyze and describe how empowerment is carried out by the village government. Researchers used Saraswati's theory which consists of 6 dimensions, namely: 1)*Learning by doing* 2)*Problem solving* 3)*Self evaluation* 4)*Self development and coordination* 5)*Self selection* 6)*Self decisim*. This research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation and conclusions. The unit of analysis is Kertawangi Village. Informants*

include the Village Head, LPMD, POKDARWIS, BUMDES and the farming community. The results of this study indicate that the empowerment carried out by the Kertawangi Village Government is seen from the dimensions of learning by doing, problem solving, self-evaluation, self-development and coordination, self-selection and self-decision, empowerment has gone well but is still not optimal.

Keywords: Community Empowerment, Village Government, Economy, Tourism Village.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor pariwisata. Potensi alam yang dimiliki Indonesia sangat beragam, sehingga di beberapa daerah mempunyai sektor pariwisata yang menunjang untuk dapat dikembangkan. Pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi suatu daerah. Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 “bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional”.

Salah satu konsep yang sedang berkembang saat ini adalah desa wisata, dimana masyarakat lokal secara aktif berpartisipasi langsung dalam pengelolaan dan mempromosikan potensi desa di lingkungan mereka. Masyarakat desa dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan desa wisata di desa itu sendiri dan mendapatkan keuntungan finansial atau ekonomi yang signifikan, melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadinya pemerataan yang sesuai dengan konsep Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Pengembangan atau pengelolaan desa wisata bertujuan untuk mengelola dan menata potensi desa di bidang kepariwisataan dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang diterima dari perangkat desa berdasarkan hak atas sumber dan hak asal usul desa. Pendapatan asli

pedesaan meliputi hasil usaha, aset, partisipasi swadaya, gotong royong dan pendapatan desa lainnya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat (2021) mencatat, hingga saat ini ada 16 Desa Wisata yang masih perlu dikembangkan supaya bisa bersaing dengan objek wisata lain. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat berharap setiap desa mampu mengembangkan desa wisata tersebut melalui potensi yang dimiliki setiap desa. Kemudian dikatakan, masyarakat desa harus mengikuti pelatihan pengelolaan desa wisata yang disupport oleh Kemenparekraf agar bisa melahirkan desa wisata yang lebih berprestasi lagi, salahsatunya melalui program pemberdayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat berharap melalui program pemberdayaan ini, masyarakat mampu meningkatkan potensinya serta mampu mengelola potensi desa tersebut agar berdampak pada ekonomi masyarakat, karena pengembangan sektor pariwisata yang dikelola dengan baik, akan menghasilkan timbal balik antara masyarakat dengan tempat wisata tersebut.

Berdasarkan penjelasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat (2021), salah satu desa yang perlu dikembangkan adalah Desa Kertawangi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Desa Kertawangi merupakan salah satu desa yang ditetapkan sebagai Desa Wisata melalui SK Penetapan Desa Wisata Bupati Bandung Barat, Nomor: 100.3.3.2/Kep. 118 -Disparbud/2024. Desa ini memiliki keindahan alam yang sangat beragam, mulai dari udara yang sejuk, tanah yang subur, pemandangan alam yang indah, air yang dingin karena berasal dari pegunungan langsung, serta beberapa wisata alam yang mengagumkan. Apabila pengelolaan potensi desa ini terkelola dengan baik, maka akan menghasilkan atau meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dikarenakan banyaknya wisatawan yang tertarik dengan wisatanya akan banyak juga pemasukan untuk desa tersebut, namun pada kenyataannya pengembangan potensi desa di Desa Kertawangi ini berbanding terbalik dengan harapan yang ada, karena kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, menjadikan desa ini minim inovasi dibandingkan desa wisata lainnya, permasalahan ini sangat berpengaruh terhadap

ekonomi masyarakat. Oleh karena itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, perlu adanya proses pengembangan desa wisata melalui pemberdayaan.

Mengacu pada penjelasan diatas hal ini selaras dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang desa dalam pasal 26 ayat 1 “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.” Maka diharapkan Kepala Desa dapat membangun dan memberdayakan Desa dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan desa wisata perlu didukung sebagai salah satu usaha penerapan wisata yang berkelanjutan. Keikutsertaan aktif masyarakat sekitar dalam setiap tahapan kegiatan, diharapkan dapat pengetahuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi, *impact* kesejahteraan masyarakat sekitar dapat terwujud secara berkesinambungan. Melalui pemberdayaan masyarakat ini diharapkan seluruh masyarakat Desa Kertawangi mampu mengelola potensi desa yang dimiliki agar menghasilkan pendapatan yang cukup untuk masyarakat sekitar dan diharapkan tidak terjadinya kesenjangan kesejahteraan masyarakat desa.

Peneliti akan menggunakan teori proses pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh (Saraswati, 2011) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui proses *learning by doing* (belajar dengan melakukan), *problem solving* (pemecahan masalah), *self evaluation* (evaluasi mandiri), *self development and coordination* (pengembangan diri dan koordinasi), *self selection* (menumbuhkan kemandirian), *self decisim* (pengambilan keputusan dengan tepat). Peneliti memilih menggunakan teori proses pemberdayaan dari Saraswati ialah teori yang paling relevan dengan tema penelitian yang akan penulis teliti, teori ini menjelaskan bahwa melalui pemberdayaan masyarakat, dalam proses pemberdayaan meliputi belajar sambil melakukan, sebagai pemecahan masalah, melalui pemberdayaan juga harus mampu mengevaluasi secara mandiri, meningkatkan kapasitas dan koordinasi, serta menumbuhkan kemandirian dan pemilihan tindakan yang tepat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan maksud mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan permasalahan dengan menggambarkan peristiwa atau fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan fakta dalam penelitian. Tujuan menggunakan pendekatan deskriptif supaya peneliti dapat menggambarkan realita empiris dibalik fenomena yang terjadi terkait dengan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Instrumen utama dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri, dalam penelitian ini adapun teknik pengumpulan data yang terdiri sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Peneliti mengumpulkan informasi beserta data-data pendukung pada latar belakang masalah, teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah dan data pendukung lainnya, data-data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal dan peraturan yang sesuai dengan fenomena masalah yang terjadi.

2. Studi lapangan

- a. Observasi

Tujuan menggunakan metode ini adalah untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan dan sebagainya tentang bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Ekonomi di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dalam observasi ini peneliti melihat bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kertawangi.

- b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan enam informan, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang bagaimana Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah

Desa untuk meningkatkan ekonomi melalui desa wisata di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

c. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang terkumpul akan menjadi bukti nyata bahwa peneliti telah melakukan penelitian dan dapat mendukung temuan-temuannya dengan data dan observasi yang telah dikumpulkan di lapangan.

PEMBAHASAN

1. *Learning by doing* (Belajar dengan melakukan)

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan maupun kesadaran masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya atau potensi yang ada di desa. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kertawangi dalam memberdayakan masyarakat melalui desa wisata ini dikatakan sebagai suatu proses belajar, karena melalui pemberdayaan ini masyarakat mendapatkan pembelajaran atau edukasi desa wisata yang meliputi sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa melibatkan semua elemen diantaranya pelaku UMKM, LPMD, BUMDES, POKDARWIS, masyarakat desa maupun desa itu sendiri. Pemberdayaan ini dianggap efektif oleh pemerintah karena terintegrasi dengan masyarakat serta pelaku utama langsung dalam meningkatkan perekonomian desa itu sendiri. Sehingga pada saat pemberdayaan berjalan dengan baik dan terintegrasi akan menghasilkan pemasaran yang lebih mudah, kerja sama yang baik antara pelaku UMKM atau pelaku lainnya. Pemerintah mengawasi pemberdayaan yang terintegrasi agar dapat berjalan dengan baik. Seperti di Desa Kertawangi, UMKM itu diawasi oleh LPMD, bekerjasama dengan BUMDES, BUMDES dipasarkan oleh POKDARWIS, pada saat ada kunjungan wisata, yaitu produk-produk dari UMKM sebagai bentuk pemberdayaan yang disuguhkan kepada pengunjung wisata.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, peneliti menganalisis bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kertawangi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat telah dilakukan secara efektif, karena melalui pemberdayaan ini masyarakat mendapatkan pembelajaran atau edukasi desa wisata yang meliputi sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan, yang dimana dalam kegiatan tersebut masyarakat diberikan pemahaman, langkah-langkah dan pemasaran mengenai Desa Wisata Kertawangi agar berdampak pada ekonomi masyarakat setempat.

2. Problem solving (Pemecahan masalah)

Dimensi problem solving atau pemecahan masalah mengacu pada sejauh mana Pemerintah Desa dapat menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Kertawangi. Dimensi ini menilai melalui pemberdayaan Pemerintah Desa harus mampu untuk mengatasi sebuah permasalahan yang terjadi. Dalam hasil observasi peneliti di lapangan, kegiatan pemberdayaan masyarakat ini memiliki berbagai masalah yang dapat ditangani oleh Pemerintah Desa dengan cara mencari inti masalah serta memahami masalah apa yang ada dalam pemberdayaan ini. Harus ada komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan Pemerintah Desa. Dengan ini pemecahan masalah dapat dilakukan dengan mudah jika adanya komunikasi yang baik.

Pemerintah Desa melakukan pemecahan masalah dari kondisi masyarakat atau permasalahannya, sehingga pihak desa membagi menjadi skala prioritas dimana ada masalah yang harus di selesaikan lebih utama dibanding masalah yang lainnya. Dalam program ini tidak semua masalahnya dapat dipecahkan dalam satu waktu sekaligus sehingga lebih diutamakan dalam masalah yang cukup besar.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, peneliti menganalisis bahwa pemberdayaan masyarakat ini telah mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di Desa Kertawangi, dengan membagi menjadi skala prioritas dimana ada

masalah yang berdampak pada masyarakat banyak, akan diselesaikan lebih dulu oleh Pemerintah Desa. Sarana untuk memecahkan masalah yang terjadi di Desa Kertawangi diberi nama 'Rembug', dimana semua lapisan masyarakat dikumpulkan untuk menilai baik atau tidaknya program yang telah dijalankan.

3. *Self evaluation* (Evaluasi mandiri)

Melalui pemberdayaan, selain dorongan dari Pemerintah Desa, masyarakat juga harus mampu mengevaluasi diri sejauh mana potensi yang ia miliki khususnya dalam mengelola desa wisata agar berdampak pada ekonomi masyarakat. pemberdayaan dalam program meningkatkan ekonomi desa ini di dukukung oleh banyak aspek sehingga pemberdayaan ini dapat berjalan dengan baik. Banyaknya partisipasi masyarakat yang ikut andil program ini membuat perubahan yang sedikit demi sedikit merubah taraf hidup masyarakat Desa Kertawangi. Dalam pemberdayaan ini sudah terbentuk POKDARWISnya, pemandu, *guide*, serta ada dukungan dari BPD, karang taruna, dan yang terpenting antusias masyarakatnya. Pemikiran masyarakat yang mulai terbuka dengan adanya desa wisata, membuat masyarakat semakin baik dalam megelola desa wisata.

Dalam hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, perubahan yang dirasakan oleh masyarakat dapat terbilang cukup banyak. Mulai dari pemikiran masyarakat, pola pikir, peningkatan ekonomi masyarakat, serta kelayakan infrastruktur yang ada di Desa Kertawangi.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan, peneliti menganalisis bahwa dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kertawangi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat telah mampu membangun kesadaran masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan baik lagi, juga berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat walau tidak terlalu signifikan tetapi masyarakat merasakan sebelum dan sesudah

dilaksanakannya pemberdayaan, melalui pemberdayaan ini juga telah meningkatkan solidaritas antar masyarakat.

4. *Self development and coordination* (Pengembangan diri dan koordinasi)

Dimensi ini merupakan dimensi yang digunakan untuk melihat perubahan masyarakat mengenai koordinasi atau hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa maupun lembaga terkait lainnya dalam pemberdayaan melalui pengelolaan desa wisata bagaimana sebelum dan sesudah dilakukannya pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, koordinasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat maupun lembaga yang terlibat sudah baik, karena seperti dijelaskan diawal bahwa Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan yang terintegritas dengan LPMD, dengan para kadus, para RT/RW, kebawahnya para pelaku UMKM yang dibantu oleh BUMDES maupun POKDARWIS.

Koordinasi atau hubungan baik antara masyarakat dan Pemerintah Desa terjalin sejak tahun 2020, karena Pemerintah Desa selalu terjun langsung ke lapangan dan melibatkan banyak masyarakat. Dorongan serta ajakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa menjadi salah satu faktor dalam koordinasi kepada masyarakat. Berdasarkan uraian hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan, peneliti menganalisis bahwa dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kertawangi dianggap berhasil karena telah membuat masyarakat mampu mengembangkan dirinya dan saling mendukung, juga koordinasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat maupun pihak terlibat lainnya sudah terbilang baik.

5. *Self selection* (Menumbuhkan kemandirian)

Melalui pemberdayaan harus mampu meningkatkan kemandirian masyarakat untuk mengembangkan potensinya dalam mengelola desa wisata agar berdampak pada ekonomi masyarakat dan

mampu menetapkan langkah ke depan. Berdasarkan hasil wawancara, dulunya masyarakat sangat awam dengan terbentuknya desa wisata, dengan rutinnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa akhirnya dapat membuka kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki oleh desa, dari yang dulunya selalu menolak pengunjung untuk mengunjungi perkebunannya, sekarang masyarakat sangat ingin area perkebunannya dikunjungi oleh banyak wisatawan.

Dalam hasil observasi peneliti di lapangan, sebelumnya masyarakat tidak mengetahui potensi Desa Kertawangi menjadi desa wisata, namun semakin kesini akhirnya pemikiran masyarakat terbuka untuk berpartisipasi mengelola desa wisata. Semakin lama, masyarakat Desa Kertawangi semakin antusias apabila banyak pengunjung yang mengunjungi Desa Kertawangi.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, peneliti menganalisis bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kertawangi telah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki oleh desa, banyak masyarakat yang lebih terbuka lagi pikirannya bahwa potensi desa yang terkelola dengan baik akan menghasilkan dampak positif untuk mereka.

6. Self decisim (Memilih Tindakan yang tepat)

Dalam memberdayakan masyarakatnya, Pemerintah Desa harus membuka kesadaran untuk memilih tindakan yang tepat, agar melalui pemberdayaan ini segala sesuatu yang telah dilaksanakan tidak sia-sia dan dapat berdampak pada ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa saat ini adalah meningkatkan ketertarikan jumlah pengunjung di Desa Kertawangi. Peningkatan tersebut dilakukan melalui promosi di media sosial, baik itu Google, Instagram, Youtube, Facebook maupun Website. Pemerintah Desa berharap melalui promosi yang selalu digencarkan ini dapat berjalan dalam jangka panjang dan tidak

berhenti pada titik tertentu. Berdasarkan uraian hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, peneliti menganalisis bahwa melalui pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa telah melakukan upaya untuk menarik ketertarikan jumlah pengunjung agar setiap tahunnya mengalami peningkatan, Pemerintah Desa melakukan promosi Desa Wisata Kertawangi melalui beberapa sosial media.

Hambatan yang terjadi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan pemberdayaan tentunya ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakatnya, yaitu:

1. Kurangnya minat serta partisipasi masyarakat dalam mengelola desa wisata. Pemerintah Desa telah melakukan beberapa usaha dalam memberdayakan masyarakatnya, mulai dari sosialisasi, pelatihanpelatihan, edukasi desa wisata, dan evaluasi hasil, namun tetap saja dalam pelaksanaannya, tidak semua masyarakat mau berpartisipasi dalam pemberdayaan ini.
2. Keterbatasan anggaran mengenai pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi di Desa Kertawangi. Setiap program pasti memiliki anggaran tertentu untuk berjalannya program tersebut, namun disebutkan oleh anggota LPMD Desa Kertawangi bahwa anggaran pemberdayaan di desa ini masih minim dan terbatas.
3. Sulitnya merubah pola pikir masyarakat khususnya mengenai pengelolaan desa wisata. Kualitas Sumber Daya Manusia tentunya sangat berpengaruh terhadap program yang sedang berjalan, dalam hal ini Pemerintah Desa masih menghadapi kendala terkait cara pandang atau *mindset* masyarakat dalam melaksanakan

pemberdayaan, mereka masih beranggapan bahwa pemberdayaan yang dilakukan tidak akan menghasilkan dampak apapun untuk masyarakat.

Upaya Untuk Menanggulangi Hambatan Yang Terjadi

Berikut merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut:

1. Untuk meningkatkan minat serta partisipasi dalam masyarakat, Pemerintah Desa memperluas jangkauan kepada masyarakat dengan memberikan keyakinan dan motivasi, serta edukasi mengenai desa wisata dengan mengharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan minat serta masyarakat setempat dalam melaksanakan program pemberdayaan.
2. Merumuskan anggaran dengan sesama dan sebaik mungkin agar alokasi anggaran sesuai dengan program yang sedang dijalankan dan lebih meningkat. Anggaran adalah modal utama dalam pemberdayaan, dikatakan bahwa anggaran pemberdayaan di Desa Kertawangi masih minim dan terbatas, maka dari itu Pemerintah Desa merumuskan dan menyesuaikan kembali agar anggaran ini sesuai dengan dana yang dibutuhkan.
3. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan berdampak pada cara pandang atau *mindset* masyarakat bahwa pemberdayaan ini tidak akan menghasilkan perubahan apapun untuk mereka, maka dari itu Pemerintah Desa dibantu oleh LPMD dan POKDARWIS untuk selalu melakukan edukasi mengenai desa wisata kepada masyarakat dan meyakinkan bahwa pemberdayaan ini akan menghasilkan dampak

positif bagi masyarakat yang sungguh-sungguh dalam melaksanakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa untuk meningkatkan ekonomi melalui desa wisata di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, maka peneliti dapat menyimpulkan pemberdayaan sudah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Desa, namun tetap masih terdapat kendala pada saat pelaksanaannya. Dalam dimensi *Learning by doing* (Suatu proses belajar) dilihat dari hasil observasi dan wawancara masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, disana masyarakat mendapatkan arahan bagaimana cara mengelola desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, namun masih banyak juga kurangnya minat serta partisipasi masyarakat dalam mengelola desa wisata.

Pada dimensi *Problem solving* (Pemecahan masalah) karena sebagian besar masyarakat Desa Kertawangi adalah petani, Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan untuk para petani yang dilakukan secara rutin seperti memberi pupuk, mengevaluasi hasil panen, membantu mempromosikan dan memasarkan hasil panen petani. Kemudian untuk para UMKM pihak desa selalu melakukan sosialisasi/pelatihanpelatihan kepada masyarakat terkait produk apa yang mereka buat, mengetahui fungsi dan tujuan produk yang mereka buat, mengevaluasi hasil penjualan para UMKM serta menganalisis hasil penjualan dan tingkat permintaan para pengunjung. Pemerintah Desa juga dibantu oleh BUMDES untuk mempromosikan dan memasarkan hasil UMKM.

Pada dimensi *Self Evaluation* (Evaluasi mandiri) melalui pemberdayaan mampu merubah sedikit-sedikit pola pikir masyarakat menjadi lebih terbuka dalam mengelola potensi desa, juga pemberdayaan ini berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat walaupun tidak terlalu signifikan.

Pada dimensi *Self Development and Coordination* (Pengembangan diri dan koordinasi) hubungan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat sudah baik, begitupun dengan lembaga-lembaga terkait lainnya seperti LPMD, BUMDES dan POKDARWIS.

Pada dimensi *Self Selection* (Menumbuhkan kemandirian) dalam pemberdayaan ini mampu meningkatkan solidaritas antar masyarakat, sedikit-sedikit membuka kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki oleh desa.

Pada dimensi *Self Decisim* (Membuka kesadaran untuk memilih tindakan yang tepat) dalam pemberdayaan ini juga Pemerintah Desa Kertawangi selalu melakukan promosi terhadap program-program yang sedang dijalanka, hal ini bertujuan agar program yang sedang berjalan tidak berhenti pada titik tertentu dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusmulyono, M. S. (2022). *Kewirausahaan Sosial, Fondasi, Ragam dan Transformasi*. Jakarta: Prasetya Mulya Publishing.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82-110.
- Indrianti, D. T., Ariefianto, L., & Halimi, D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Organik di Kabupaten Bondowoso. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 13-18.